Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	3

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Dorong Pemprov Bangun Fasilitas Daycare

Pemerintah DKI Jakarta didorong membuat fasilitas daycare atau tempat penitipan anak yang dapat sangat membantu bagi pekerja perempuan.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 pada Senin (1/5/2023).

"Salah satu urgensi untuk menghapus diskriminasi di kalangan pekerja adalah membangun fasilitas daycare yang disubsidi pemerintah di banyak tempat. Perempuan yang masih harus atau mau bekerja dapat menitipkan anak di sana selama jam kerja," kata Anggara.

"Kenapa saya katakan untuk menghapus diskriminasi? Karena banyak kita dengar perempuan angkatan kerja harus keluar dari pekerjaan karena harus sibuk dengan urusan domestik mengurus anak. Atau mereka yang masih punya kerepotan mengurus anak juga susah dapat pekerjaan," tambahnya.

Anggara menuturkan bahwa saat ini keberadaan daycare yang terjangkau masih sangat terbatas di Jakarta. Saat ini layanan daycare justru identik dengan kelas menengah ke atas karena biayanya sangat mahal.

"Kisarannya di atas dua juta rupiah per bulan misalkan. Mungkin ada yang murah tapi kualitasnya diragukan. Padahal kebutuhan penitipan anak ini banyak ditemukan pada kelas pekerja," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Selain membangun tempat penitipan anak milik pemerintah, Anggara mengusulkan Pemprov DKI juga bisa membuat regulasi kewajiban bagi para pengusaha untuk membangun daycare. Harapannya keberadaan daycare dapat lebih banyak karena ada peran dari pihak perusahaan.

"Kita bisa bangun beberapa titik daycare terkhusus daerah pinggir Jakarta untuk para komuter yang bekerja di pusat kota. Bisa juga dibuat regulasi untuk para pengusaha menyediakan fasilitas tersebut. Dengan tawaran insentif yang menarik tentunya," jelas Anggara.

Sebelumnya Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membantah soal sebagian dari ruangan Tempat Penitipan Anak (TPA) Negeri Bale Belajar Balai Kota akan dialihfungsikan sebagai ruang VVIP.

TPA yang juga sebagai Pembelajaran Anak Usia Dini (PAUD) itu berada di lantai dasar Blok G sekitar Balai Kota, DKI Jakarta.

"Tidak (bukan jadi ruang VVIP). Kata siapa? Tadi Biro Umum sudah saya panggil," ujar Heru saat di kawasan Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Proses pembongkaran sebagian ruangan TPA hasil peninggalan era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu hanya dilakukan untuk kepentingan renovasi.

Hanya saja pada proses perbaikannya TPA itu disebut memperkecil ruangan. "Tadi saya sudah koordinasi, mau sebagian ruangan itu, mau dirapihkan. Sehingga harus ditata," kata Heru. **(faf/Kompas.com)**

istimewa